

ANALISA MARAKNYA PEMANFAAT PLATFORM DALAM PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI PERSPEKTIF STRUKTURASI ALA GIDDENS (TINJAUAN SOSIOLOGI DIGITAL)

Dwiki Faiz Sarvianto

Badan Amil Zakat Nasional RI

Jl. Matraman Raya, Kebon Manggis, Jakarta Timur

DOI: 10.46781/al-mutharahah.v18i1.235

Abstract

The potential and realization of zakat reported by BAZNAS as a government agency are still far from expectations. One indication that appears significantly as a cause of digital sociology is the increasing number of actors using platforms to collect zakat. This then needs to be explored further about its attention, considering the digitization will not be stopped as well. This review is analyzed using a qualitative approach with descriptive analysis through relevant literature study techniques in order to form conceptual/ new findings. The results of the review suggest that it's easy to find support in digital age for activism through the use of digital tools. Thus, it's able to encourage other actors to be involved in seeking and collecting zakat. Like the two sides of the coin, the ease for muzaki in distributing zakat certainly occurs thanks to digitization. On the other hand, the supervision of related stakeholders down to the individual level as zakat/ alms collectors must be considered, especially from BAZNAS. If this is not the case, the distribution of zakat can be misused due to its own interests. In the future, because they can't cut off the development of digital devices and actors, juggernaut symptoms will occur.

Keywords: *Collection of Zakat, Digital Sociology, Structuration*

Abstrak

Potensi dan realisasi zakat yang dilaporkan oleh BAZNAS selaku lembaga pemerintah masih terbilang amat jauh dari harapan. Salah satu indikasi yang hadir secara signifikan sebagai penyebab dari kacamata sosiologi digital ialah maraknya aktor pemanfaat platform untuk mengumpulkan zakat. Hal itu yang kemudian perlu ditelaah lebih jauh perhatiannya, mengingat soal digitalisasi tak akan terbendung pula. Tinjauan ini ditelaah menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif melalui teknik studi literatur yang relevan guna membentuk konseptual atau bahkan temuan baru. Hasil tinjauan menyebutkan bahwa terdapat kemudahan dalam mencari dukungan di era digital untuk aktivisme melalui penggunaan perangkat digital. Sehingga, mampu mendorong pula aktor-aktor lain untuk terlibat dalam pencarian dan pengumpulan zakat. Bagaikan dua sisi mata koin, kemudahan bagi muzaki dalam menyalurkan zakatnya tentu terjadi berkat digitalisasi. Sisi lain, pengawasan pada *stakeholders* terkait hingga level individu sebagai penghimpun zakat/ sedekah nampaknya harus diperhatikan, khususnya dari BAZNAS. Jika tak demikian, penyaluran zakat dapat disalahgunakan akibat kepentingannya sendiri. Ke depan, lantaran tak dapat memutus perkembangan perangkat digital dan aktor, gejala *juggernaut* akan terjadi.

Kata Kunci: *Pengumpulan Zakat, Sosiologi Digital, Strukturasi*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, permasalahan kemiskinan dan ketimpangan antardaerah selalu menjadi isu utama sosial-ekonomi yang diperhatikan sebagaimana tujuan pertama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Badan Pusat Statistik (BPS) dengan ukuran garis kemiskinannya menyebutkan bahwa pada Maret 2020, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan hingga hampir 11 persen¹. Berbeda bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut mengalami kenaikan 0,56 persen. Meskipun demikian, dapat dimungkinkan pula bahwa masih terdapat penduduk yang hidup dengan kondisi hanya sebatas indikator garis kemiskinan BPS saja dan sangat rentan untuk kembali miskin lagi².

Menurut Bappenas dalam dokumen pilar pembangunan sosial-ekonominya, ke depan pemerintah memang sangat membutuhkan pendekatan yang holistik dengan kerja sama antarpihak untuk menangani permasalahan kesejahteraan bagi penduduknya³. Tak terkecuali untuk semua sektor, diharapkan turut dapat membantu hadirnya program produktif maupun dana konsumtif yang memperingan penduduk miskin baik secara mikro/ rumah tangga. Begitu pula dengan kehadiran agama Islam yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia⁴.

Islam sendiri melalui ajarannya telah memerintahkan kepada umatnya untuk menunaikan zakat maupun memberikan harta bendanya bagi yang mampu kepada tidak mampu dengan infak/ sedekah. Setara dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 110 dan Q.S. At-Taubah ayat 103 bahwa penunaian zakat dapat mendatangkan manfaat dunia maupun akhirat kelak. Dari segi tujuannya pun, zakat secara jelas dapat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan di seluruh wilayah maupun kebutuhan lainnya di jalan Allah sesuai aturan syariah⁵. Tertuang dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, beberapa golongan dalam *asnaf* disebutkan dari fakir hingga *fi sabilillah* berhak mendapatkan zakat berlandaskan kadar makna *li* dan *fi* pada prioritasnya.

Walaupun demikian, realitasnya pengumpulan zakat baik fitrah maupun mal secara kuantitas masih belum mampu menyumbang secara penuh upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi hingga kini. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, memiliki beberapa catatan yang relatif kurang positif, khususnya pada konteks pengumpulannya. Satu sisi, data BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat tahun 2019 yang mampu diterima oleh pemerintah melalui institusinya seharusnya dapat mencapai ± Rp 233 triliun⁶. Namun, sisi lain, realisasinya di tahun tersebut yang diterima oleh BAZNAS hanya satu digit saja yakni sebesar ± Rp 8 triliun atau 3,5 persen dari total potensi sebelumnya. Perbedaan yang ada tentu sangat disayangkan mengingat dari segi jumlah penduduk, Indonesia menempati negara penduduk muslim terbanyak di dunia, walau tak semuanya termasuk pada golongan muzaki. Paling tidak ditambah dengan zakat mal perusahaan, penghasilan maupun lainnya, soal realisasi asumsinya tak semininim itu.

¹ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2020," 2021, <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18%2000:00:00/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html>

² The World Bank, "Ikhtisar: Sekilas Tentang Indonesia," 2014, <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>

³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial," 2017, <http://sdgs.bappenas.go.id/pilar-sosial/>

⁴ Muniaty Aisyah, "The Role of Zakah and Binary Economics in Poverty Reduction," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4, no. 2 (2014): 178-197, <http://dx.doi.org/10.15408/ess.v4i2.1964>

⁵ Mohd Masroom, Wan Yunus, and Miftachul Huda, "Understanding of Significance of Zakat (Islamic Charity) for Psychological Well-being," *Journal of Critical Reviews* 7, no. 2 (2020): 693-697, <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.02.127>

⁶ Badan Amil Zakat Nasional, "Statistik Zakat Nasional 2019," 2019, <https://pid.baznas.go.id/statistik/>

Adanya perbedaan antara potensi dan realisasi dalam pengumpulan zakat menjadi salah satu permasalahan yang harus ditelaah berikutnya lantaran dari segi perkembangan zaman pun terdapat indikasi lain sebagai penyebab hal itu terjadi⁷. Saat ini, maraknya platform/ media sosial memberikan kecenderungan tersendiri bagi masyarakat luas dalam mengumpulkan zakat/ sedekahnya pada suatu lembaga swasta, komunitas maupun individu langsung yang termasuk dalam *asnaf*⁸. Apalagi di Indonesia sendiri, jumlah pertumbuhan kepemilikan *smartphone* dan akun media sosial terus bertambah cukup pesat⁹. Menurut Lupton, munculnya perkembangan media sosial termasuk fiturnya (platform) dapat memberikan dampak positif ataupun negatif untuk melakukan aktivitas/ gerakan yang diharapkan memunculkan empati maupun hubungan asosiatif baik materi/ bukan¹⁰.

Bila dipadankan terhadap realisasi penerimaan zakat pada BAZNAS, maka hal itu berbanding terbalik lantaran jumlahnya sangat minim atas potensi yang ada. Selain tak turut menyumbang penuh upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, minimnya realisasi zakat turut menjadikan tugas tambahan bagi pemerintah dalam menyinergikan sektor agama terhadap program-program pembangunannya agar menunjang pemberdayaan masyarakat secara luas¹¹. Oleh sebab itu, dari beberapa uraian masalah dan fenomena digitalisasi pada pengumpulan zakat, maka harus dipertegas kembali analisisnya secara kritis dengan perspektif sosiologi digital berdasarkan situasi satu-satunya lembaga resmi pemerintah (BAZNAS) lantaran masalah yang ada lekat padanya. Sehingga, melalui penulisan ini, paling tidak, aspek pengumpulan zakat dengan digitalisasi perlu diperhatikan agar mampu membangun narasi yang positif untuk mendorong muzaki menyalurkan zakatnya pada BAZNAS.

B. METODE PENELITIAN

Perbedaan potensi dengan realisasi zakat pada BAZNAS yang sangat jauh kuantitasnya dari segi pengumpulan menjadikan kehadiran platform termasuk media sosial salah satu indikasi penyebab masalah dalam penelitian ini¹². Tak sampai itu saja, maraknya pihak eksternal yang turut mengumpulkan zakat/ sedekah secara tidak langsung akan menyebabkan perolehan lembaga pemerintah (BAZNAS) mengalami penurunan¹³. Meskipun BAZNAS terbilang resmi, di bawah pantauan kantor akuntan publik, dan terorganisir, hal itu juga akan berdampak pada penyaluran kepada mustahik yang memang telah masuk kategorisasi penerima manfaat oleh pemerintah. Menurut Amelia, apabila BAZNAS ingin menyalurkan sedekah apapun, khususnya zakat kepada mustahik, maka perolehan zakat yang dicapainya dapat dikatakan harus optimal agar keberlanjutan program terlaksana, terlebih ada dana produktif di dalamnya¹⁴. Oleh karena itu, berdasarkan paparan sebelumnya, sangat penting untuk

⁷ Ahmad Alam, "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal Manajemen UIKA* 9, no. 2 (2018): 128-136, <http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>

⁸ Ade Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat melalui Digital Fundraising," *Al Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59-90, <https://dx.doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>

⁹ Dwiki Sarvianto, "Dilema Dwifungsi Pemanfaatan Informasi dalam Pembentukan Ketimpangan Sosial Baru di Indonesia (Telaah Sosiologi Digital melalui Perspektif Interaksionisme Simbolik)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 9, no. 2 (2020): 493-509. <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43452>

¹⁰ Deborah Lupton, *Digital Sociology* (Oxon: Routledge, 2015), hlm 2.

¹¹ Armidi Musa, "Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis)," *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2014): 347-370, <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v16i2.1749>

¹² Ahmad Alam, "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal Manajemen UIKA* 9, no. 2 (2018): 128-136, <http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>

¹³ Ade Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat melalui Digital Fundraising," *Al Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59-90, <https://dx.doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>

¹⁴ Erika Amelia, "Penyaluran Dana Zakat Produktif melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)," *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (2012): 79-92, <http://dx.doi.org/10.15408/sjje.v1i2.2600>

mengaitkan serta menjelaskan fenomena maraknya kehadiran aktor dari segi pengumpulan zakat dengan BAZNAS sebagai pengawas pengelolaan zakat melalui perspektif sosiologi digital.

Sisi lain, sebagai alat analisisnya, teori strukturasi dari Anthony Giddens diasumsikan sangat tepat untuk meninjau kembali aspek pengumpulan zakat secara sosiologis. Menurut Kinseng, strukturasi dari Giddens mampu memberikan perspektif mengenai keterkaitan struktur yang dapat diandaikan sebagai sebuah lembaga dengan seseorang (aktor/ agen)¹⁵. Apalagi di tinjauan ini, dengan konteks BAZNAS, maraknya platform yang digunakan oleh muzaki dan tindakannya secara individu sangat menonjol untuk dipaparkan. Jembatan yang dibangun oleh Giddens untuk strukturalisme dan fenomenologis sangat penting diulas apabila di dalam realitas sosial terdapat tindakan individu dengan peraturan/ nilai-nilai sekitarnya¹⁶.

Tinjauan ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisa deskriptif dengan teknik studi literatur sesuai realitas sosial yang terjadi¹⁷. Mengaitkan hasil empiris yang bersumber dari penelitian sebelumnya dan merumuskan suatu konseptual baru dengan teori strukturasi ala Giddens sebagai alat analisis merupakan salah satu tahapan riil dalam metodologi ini¹⁸. Menurut Sarvianto, teknik studi literatur dapat dimulai dari pengumpulan literaturnya yang relevan terlebih dahulu seperti data statistik, artikel jurnal, dan buku teks tentang fenomena sosiologi digital terdahulu maupun terkini¹⁹. Kemudian, setelah pengumpulan literatur, telaah per artikel maupun bacaan yang mendukung harus dilakukan agar menemukan korelasi dengan judul dalam tinjauan ini. Terakhir, dari hasil telaah literatur, baru pada tinjauan ini penulis harus mensitesakan informasi yang didapat ke dalam konseptual/ temuan baru²⁰.

C. PEMBAHASAN

Kemudahan Meraih Dukungan dalam Aktivisme

Hadirnya platform maupun media sosial saat ini memberikan banyak dampak positif terhadap tindakan yang bersifat persuasif kepada individu lain dalam beberapa sektor, mulai penjualan, kampanye politik, hingga undangan biasa. Pada konteks pengumpulan zakat, infak hingga sedekah, soal ajakan untuk beramal telah jarang menggunakan kegiatan konvensional. Saat ini, berbagai platform telah muncul untuk mendukung kegiatan aktivisme sebagaimana tujuannya demi kebaikan, membantu pihak lain maupun mengadakan kegiatan amal.

Menurut Chon dan Park, penyebab hadirnya dukungan baik materi/ bukan dalam hal aktivisme ialah lantaran hadirnya kemudahan mengakses informasi apapun pada internet sehingga setiap individu sebagai penggunaannya dapat terpapar²¹. Selain itu, berkat konten yang ada (foto/ video/ poster) serta pesan moralnya untuk melakukan suatu kebaikan, hal itu turut mendorong individu lain termotivasi agar melakukan gerakan sosial dengan positif. Secara tidak langsung, kehadiran kemudahan mencari dan memberikan informasi layaknya kegiatan

¹⁵ Rilus Kinseng, "Structurgency: A Theory of Action," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (2017): 127-137, <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17972>

¹⁶ Nirzalin, "Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens," *Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala* 3, no. 3 (2013): 15-24.

¹⁷ John Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third Edition (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2009), hlm 175.

¹⁸ Milya Sari, and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA* 6, no. 1 (2020): 917-929.

¹⁹ Dwiki Sarvianto, "Dilema Dwifungsi Pemanfaatan Informasi dalam Pembentukan Ketimpangan Sosial Baru di Indonesia (Telaah Sosiologi Digital melalui Perspektif Interaksionisme Simbolik)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 9, no. 2 (2020): 493-509, <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43452>

²⁰ Dwiki Sarvianto, "The Role of Digital Platforms in The Transfer of Knowledge and Qualificationism: A Study of Digital Sociology," *Simulacra* 3, no. 1 (2020): 69-80, <https://doi.org/10.21107/sml.v3i1.7125>

²¹ Myoung Chon, and Hyojung Park, "Social Media Activism in the Digital Age: Testing an Integrative Model of Activism on Contentious Issues," *Journalism & Mass Communication Quarterly* 97, no. 1 (2020): 72-97, <https://doi.org/10.1177%2F1077699019835896>

aktivis pada umumnya, mengindikasikan bahwa kesamaan nilai, makna, dan tujuan akan turut terjadi sampai sekarang²². Meskipun membutuhkan waktu, lebih kurang, kemudahan menyebarkan dan menyerap informasi dalam aktivisme tidak memakan sumber daya yang begitu banyak dibandingkan dengan aksi ke jalan melalui demonstrasi. Bahkan, untuk meraih dukungan politis antarpihak, berbagai platform seperti petisi daring mulai bermunculan²³.

Apalagi dengan konteks pengumpulan zakat, dengan dukungan kebaikan dunia dan balutan agama, tentu saja asumsinya tidak sulit untuk mengajak individu lain beramal. Penelitian dari Karmanto dan Baskoro menyebutkan bahwa dengan adanya platform *crowdfunding* termasuk media sosial dan *financial technology*, intensi muzaki/ pendonor dana sedekah sangat mudah dipikat²⁴. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa kepercayaan akan terus tumbuh apabila Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) maupun pihak individu yang menggelar aksi aktivisme dapat bertanggung jawab. Adapun sebagai keterangan penting tambahan, dari beberapa artikel yang ditemukan, makna aktivisme melalui platform ini terdapat beberapa sebutan lain seperti *digital activism*, *activism in the digital age*, *social media activism*, dan *zakat crowdfunding*²⁵.

Meskipun demikian, tak dipungkiri juga hadirnya kemudahan mencari dukungan turut dimanfaatkan oleh oknum-oknum kriminal demi mendapatkan keuntungannya sendiri. Schwab mengungkapkan bahwa masifnya perkembangan teknologi juga dihantui oleh kejahatan keuangan yang sering tak diketahui oleh orang banyak²⁶. Pada konteks pengumpulan sedekah, khususnya zakat, terdapat beberapa indikasi yang mampu menjebak individu awam agar merugi.

Dari segi ketidakbenaran informasi, soal hoaks menurut Sarvianto cukup tak terbendung di era kini jika pengguna perangkat digital abai dan hanya membaca sekilas informasi yang ada²⁷. Hadirnya hoaks hanya akan mendorong dukungan berupa non-materi maupun materi dalam konteks ini pengumpulan dana donasi (ZIS), tanpa harus mengetahui tujuan penyalurannya kepada *asnaf* atau penerima manfaat. Bukan hanya masalah transparansi bagi OPZ, kemudahan untuk menipu saat ini telah mampu dimanfaatkan hingga pada level mikro (individu) melalui menariknya konten maupun pesan-pesan yang dinarasikan, bahkan sampai pada benar-benar membohongi. Belum lagi termasuk masalah anonim yang menggelar kegiatan aktivisme tersebut terkait permintaan dukungan. Khawatirnya, melalui dana yang tidak dapat diketahui pengelolaannya, dana sosial keagamaan ini mampu berpotensi menjadi salah satu sumber finansial terorisme juga²⁸.

Sangat penting diperhatikan memang apabila tujuan kesolidaritasan sosial untuk membantu sesama namun masih dapat dimanipulasi oleh beberapa aktor, baik OPZ, komunitas ataupun individu. Padahal, kepercayaan para muzaki atau pendonor dana sedekah dapat ditentukan oleh baiknya/ kebenaran penyalurannya yang diwadahkan maupun dilaksanakan

²² Petros Chamakiotis, Dimitra Petrakaki, and Niki Panteli, "Social Value Creation through Digital Activism in an Online Health Community," *Information Systems Journal* 31, no. 1 (2020): 94-119, <https://doi.org/10.1111/isj.12302>

²³ Deborah Lupton, *Digital Sociology* (Oxon: Routledge, 2015), hlm 146.

²⁴ Gina Karmanto, and Baskoro, "Penggunaan Platform Crowdfunding dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat," *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2020): 1-15.

²⁵ Eny Ratnasari, Suwandi Sumartias, and Rosnandar Romli, "Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia," *Nyimak: Journal of Communication* 5, no. 1 (2021): 97-116, <http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v5i1.3218>

²⁶ Klaus Schwab, *Revolusi Industri Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 104.

²⁷ Dwiki Sarvianto, "Dilema Dwifungsi Pemanfaatan Informasi dalam Pembentukan Ketimpangan Sosial Baru di Indonesia (Telaah Sosiologi Digital melalui Perspektif Interaksionisme Simbolik)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 9, no. 2 (2020): 493-509, <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43452>

²⁸ Wenda Hartanto, "Analisis Pencegahan Tindak Pindana Pendanaan Teroris pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 379-392.

oleh siapapun²⁹. Bentuk-bentuk kegiatan seperti literasi media, informasi hingga digital harus dimasifkan juga bila disandingkan dengan kejahatan digital yang terjadi³⁰. Sehingga, potensi rekonfirmasi dari individu sebagai pengguna perangkat digital akan timbul untuk merespons era digital kini³¹. Paling tidak, mengetahui latar belakang penggalangan dana dilakukan untuk aktivisme, seperti zakat, infak atau sedekah.

Dilema BAZNAS dari Perspektif Strukturasi pada Konteks Kemunculan Aktor

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS diamanahkan oleh Presiden untuk melakukan pengelolaan zakat secara kompleks dan nasional. Hal itu kondisinya mencakupi dua unsur utama di dalamnya yakni terkait pengumpulan dan pendistribusian³². Tak hanya itu, menurut Syafiq, BAZNAS turut hadir pula dalam pengawasan, monitoring, dan bertanggung jawab atas peningkatan akuntabilitas pihak-pihak pengelola zakat, dalam konteks ini tentu pengumpulan zakat turut termasuk³³.

Masifnya perkembangan perangkat digital hingga banyaknya platform yang memudahkan pengumpulan dana untuk aktivisme membawa dilema tersendiri bagi BAZNAS sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Bila membedah melalui strukturasi, maka soal struktur yang substansinya meliputi aturan serta institusi terkait tak bisa dilewatkan³⁴. Hampir sama konteksnya dengan sektor pendidikan maupun *market place*, hadirnya platform memberikan lubang sangat luas bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan sumbangan pengumpulan dana donasi baik dalam bentuk zakat maupun lainnya. Hal itu dapat meliputi kelembagaan dari institusi OPZ, komunitas hingga individu lantaran untuk legitimasinya sangat bergantung pada *security* dari platform yang ada, bukan pada BAZNAS maupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sehingga, wajar saja, hingga level individu pun mampu menikmati penggalangan donasi bentuk apapun mengingat panduan yang berlaku dan pengetahuannya hanya meliputi itu. Dari sisi zakat juga, menurut Wijaya dan Khotijah, hadirnya revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan amil zakat sebagai pendekatan akses dari para muzaki terhadap calon muzaki³⁵. Keberadaan CPS, *Internet of Things* (IoT), atau *artificial intelligence* mampu membawa dampak signifikan hadirnya banyak platform yang multiguna.

Sisi lain sebagai dilema yang buruknya, bila disandingkan dengan tugas dan fungsi BAZNAS yakni tentu saja terhadap sektor pertumbuhan pengumpul zakat serta pengawasannya. Jika dipetakan menjadi dua pihak yang dominan, yakni OPZ dan komunitas

²⁹ Azy Yazid, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 173-199.

³⁰ Vibriza Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4 no. 2 (2017): 142-164, <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586>

³¹ Egi Baihaki, "Islam dalam Merespons Era Digital: Tantangan Menjaga Komunikasi Umat Beragama di Indonesia," *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3 no. 2 (2020): 185-208, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1926>

³² Irfan Beik, Huzaifah Hanum, Dadang Muljawan, Diana Yumanita, Astrid Fiona, and Jhordy Nazar, *Core Principles for Effective Zakat Supervision* (Jakarta: BAZNAS - Bank Indonesia, 2015), hlm 8.

³³ Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3 no. 1 (2016): 18-39, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>

³⁴ Nirzalin, "Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens," *Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala* 3, no. 3 (2013): 15-24.

³⁵ Reza Wijaya, and Siti Khotijah, "Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 9 no. 2 (2020): 1-8, <http://dx.doi.org/10.35906/je001.v9i2.569>

tertentu, maka kedua pihak itu dapat dibayangkan hadirnya secara masif melalui platform. Belum lagi di setiap aras, kedua pihak itu mampu menghadirkan wakilnya pada level kabupaten/ kota, provinsi maupun nasional, tentu sangat gencar pertumbuhan pengumpulan zakatnya.

Pada konteks institusi yang diasumsikan hadir pada teori strukturasi, mengenai tugas dan pokok dari pengawasan pengelolaan zakat dapat dinilai menjadi tantangan BAZNAS sendiri di masa kini³⁶. Sistem hubungan yang terbangun antara muzaki dengan banyaknya OPZ maupun pihak lain pada sebuah platform memberikan indikasi tersendiri secara kuantitas. Indikasi tersebut berisikan substansi soal pengawasan dari BAZNAS yang berpotensi akan kurang ketat mengingat minimnya sumber daya yang dimiliki dibandingkan pertumbuhan pihak-pihak pengelola zakat yang masif.

Selain itu, sebagaimana institusi yang di dalamnya terdapat peraturan serta norma pula, tak hanya tata kelola secara administratif dan konvensional, BAZNAS juga harus mewujudkan *good e-governance* di era kini dengan konteks pengaturan pada dunia virtual/ *cyber*³⁷. Urgensi peningkatan akuntabilitas pihak-pihak yang terkait memang tak dipungkiri sangat penting lantaran dengan basis agama, aspek kepatuhan pada syariat perintah Allah dan Rasul-Nya harus menjadi corak keutamaan. Hal itu mempertimbangkan kebaikan dunia dan akhirat pula dengan amanah pada BAZNAS yang harus menebar kebaikan demi umat³⁸. Ke depan, nampaknya bagi BAZNAS, penertiban maupun persyaratan dari sebuah platform harus diperketat kembali lantaran ada sebuah perhitungan presisi di dalamnya terkait penyaluran zakat. Setara dengan ungkapan Schwab, sudah saatnya institusi yang sifatnya ada fungsi pengawasan, harus dibangun pula secara digitalisasi dalam tindakannya³⁹. Minimal, relasi dengan pihak-pihak *stakeholders* pembuat platform telah terjalin.

Beranjak dari sisi institusi, dalam strukturasi ada pula sisi agensi yang dilihat dari kebebasan individu merujuk pada *grand theory* mengenai fenomenologi maupun struktural fungsionalis⁴⁰. Meskipun maraknya pertumbuhan pengumpul/ penghimpun zakat/ dana lainnya, muzaki/ pendonor dana dalam konteks ini memiliki hak untuk menyalurkan atau tidak dari harta yang dimilikinya kepada para aktor dalam platform. Pada konteks penyaluran harta dari individu tersebut, memang ditemukan juga bahwa terdapat individu yang lebih memilih untuk langsung mendistribusikan zakat/ dana sosial lainnya secara *offline*/ konvensional ke lingkungan sekitar rumahnya daripada melalui proses *online* maupun lembaga seperti BAZNAS⁴¹. Bahkan tentu saja, ada pula yang memang dari kalangan potensi muzaki/ pendonor tetapi malah tidak ikut membantu sesama walaupun telah diliputi masifnya isu kemiskinan di sekitarnya.

³⁶ Zainal Achmad, "Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens," *Jurnal Translitera* 9 no. 2 (2020): 45-52, <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.989>

³⁷ Driss Kettani, and Bernard Moulin, *E-Government for Good Governance in Developing Countries* (London: Anthem Press, 2014), hlm 1.

³⁸ Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3 no. 1 (2016): 18-39, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>

³⁹ Klaus Schwab, *Revolusi Industri Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 105-106.

⁴⁰ Haedar Nashir, "Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens," *Sosiologi Reflektif* 7 no. 1 (2012): 1-9.

⁴¹ Ahmad Muthohar, "Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat," *Inferensia: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10 no. 2 (2016): 381-404, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.381-404>

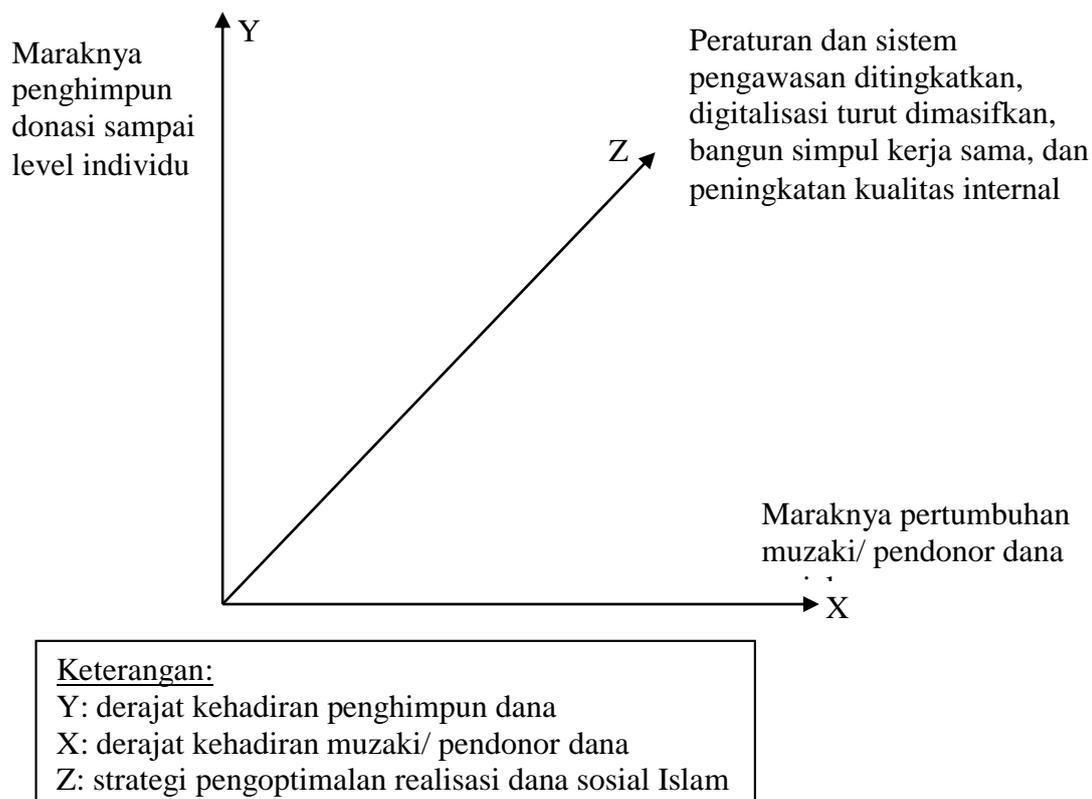
Keberadaan kesadaran, pengetahuan, dan kepercayaan dirasa penting untuk diperhatikan oleh BAZNAS maupun *stakeholders* terkait apabila ingin pengumpulan dana sosial keagamaan dioptimalkan. Relasi hubungan dengan muzaki dalam konteks ini khususnya harus dijaga erat dan bersifat asosiatif lantaran kebebasan individu turut menyertai pengambilan keputusan dalam mengumpulkan zakat. Jika sudah digencar oleh hubungan disosiatif seperti ketidakjelasan penyaluran maupun pengabaian transparansi keuangan, maka hal itu yang kemudian berdampak negatif pada akumulasi pengumpulan zakat antara potensi dengan realisasi. Risiko akan kehilangan kepercayaan, berikutan citra dari penghimpun dana akan tinggi terjadi⁴². Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa secara teknis hadirnya pertumbuhan OPZ hingga penghimpun dana di level individu membawa dampak positif tersendiri yang salah satunya mengenai kemudahan untuk menyalurkan harta dari individu mampu. Tak perlu untuk melakukan perjalanan, banyaknya kemunculan platform, jarak dan waktu kian terkikis sehingga cukup dari perangkat digital saja ibadah dapat dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada, telah diperjelas bahwa kehadiran platform mampu membawa peran positif maupun negatif dari sisi BAZNAS pada pengumpulan zakat melalui OPZ, komunitas maupun individu. Tantangan yang harus dilalui oleh BAZNAS untuk dimensi pengumpulan zakat daripada penyalurannya cukup berat saat ini. Pengumpulan zakat yang secara masif sekarang lebih tersebar dan banyak namun berbanding terbalik dengan realisasinya, harus dilalui oleh BAZNAS dengan strategi peningkatan pengawasan, sistem digitalisasi, kerja sama⁴³. Selain itu, soal kualitas internalnya seperti SDM, institusi, sarana, dan prasarana yang keseluruhannya berlandaskan syariah harus mampu ditingkatkan kembali seiring perkembangan zaman⁴⁴. Oleh sebab itu, bila digambarkan secara konseptual dengan sudut pandang strukturasi ala Giddens melalui tinjauan sosiologi digital yang telah diulas, maka Gambar 1 berikut menunjukkan celah tindakan yang dapat dilakukan BAZNAS bersama *stakeholders* terkait.

⁴² Irfan Beik, Huzaifah Hanum, Dadang Muljawan, Diana Yumanita, Astrid Fiona, and Jhordy Nazar, *Core Principles for Effective Zakat Supervision* (Jakarta: BAZNAS - Bank Indonesia, 2015), hlm 32.

⁴³ Ahmad Alam, "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal Manajemen UIKA* 9, no. 2 (2018): 128-136, <http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>

⁴⁴ Ahmad Muthohar, "Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat," *Inferensia: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10 no. 2 (2016): 381-404, <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.381-404>



Gambar 1. Grafik diagonal derajat kehadiran penghimpun dengan pendonor dana
Adanya Gejala *Juggernaut*

Hadirnya sosiologi sampai sekarang dapat digunakan pula untuk memprediksi fenomena sosial di masa depan yang dalam konteks ini berhubungan dengan sosiologi digital dan khususnya zakat. Banyaknya aktor yang memanfaatkan platform sebagai media untuk mengumpulkan dana sosial menjadi sorotan jika disandingkan dengan tugas, fungsi, dan masalah yang dihadapi BAZNAS. Dampak ke depan apabila pertumbuhan platform dan aktor tidak disikapi serta lantaran tak mungkin diputus juga relasinya, maka fenomena *juggernaut* akan terjadi.

Juggernaut sendiri diambil dari pernyataan Anthony Giddens mengenai situasi post-modern yang memberikan corak khas dibandingkan era sebelumnya. *Juggernaut* diartikan sebagai panser raksasa (pihak tertentu) yang mengilustrasikan kehidupan modern kini telah tak terkendali atau *uncontrol* pada sektor apapun⁴⁵. Dirinya mampu menembus batas waktu dan ruang yang kerap menjadi hambatan seiring adanya keperluan suatu hal. Sehingga, apabila tidak mampu menghadapinya untuk melayani/ mengikuti arusnya, maka kuasa dari pihak lain yang dominan akan menindas atau memanipulasi untuk keuntungannya sendiri⁴⁶.

Begitu pula dengan pertumbuhan aktor pemanfaat platform sebagai media mengumpulkan zakat dan dana lainnya. Ke depan, pertumbuhannya dapat tidak mampu dikontrol karena kemudahan akses informasi dan sumber daya, sehingga nampaknya akan menjadi masalah mengingat ada kemungkinan untuk berkepentingan di balik pengumpulan dana/ donasi yang dilakukan. Kepentingan seperti terorisme, pembelanjaan kebutuhan pribadi

⁴⁵ Mohammad Dulkiah, "Pemanfaatan Media dalam Memahami Realitas Sosial di Kalangan Mahasiswa UIN SGD Bandung," *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1 no. 1 (2013): 95-105.

⁴⁶ Setiadi, "Jawa, Juggernaut, dan Alam sebagai Tembang tentang Ziarah Tanah Jawa," *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra* 1 no. 1 (2013): 75-83, <https://doi.org/10.22146/poetika.v1i1.10386>

hingga kebohongan semata dapat timbul lantaran adanya “jamur pengumpulan dana sosial berbasis platform”.

Sama seperti suatu organisasi/ lembaga pemerintah pada umumnya yang pasti ada keterbatasan sumber daya dan kebutuhannya juga. BAZNAS dalam konteks ini diindikasikan tidak mampu menghambat dan melakukan pengawasan secara optimal jika perhatiannya dari pemerintah pusat/ daerah kurang. Jangkauan yang besar dan harus mendetail terhadap banyaknya aktor harus dilakukan secara selektif agar pengumpulan zakat khususnya dapat maksimal sesuai potensi dan kepatuhan syariah. Para muzaki pun akan meningkat kepercayaannya bilamana diimbangi dengan kinerja pengumpulan hingga penyaluran yang efisien dan efektif, khususnya dari BAZNAS terlebih dahulu sebagai pengawas utama pengelola zakat⁴⁷.

Terakhir, harus diakui memang tidak ada salahnya pertumbuhan pengumpulan donasi berbasis platform sangat masif berkembang, tetapi juga harus disertai maksud, transparansi, dan akuntabilitas yang tepat. Di samping itu, sebenarnya apabila optimalisasi pengumpulan zakat di BAZNAS hadir, maka hal itu turut dapat membantu pemerintah pusat/ daerah secara langsung melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui program-program layanan di bawah naungannya. Sasaran dan ketepatan penerima manfaat/ *asnaf* telah ditunjukkan oleh BAZNAS melalui kriteria sesuai peraturan pemerintah dan aturan syariah. Sehingga, selama ini masalah krusial soal kemelaratan yang hadir tanpa diimbangi realisasi pendanaan secara signifikan dapat terwujudkan solusinya.

D. SIMPULAN

Kemudahan akses informasi dan menariknya konten dapat dikatakan cukup efektif untuk memobilisasi perhatian pengguna perangkat digital agar tertarik sebuah aktivisme. Dari ketertarikan yang ada, donasi berupa dana apapun dapat masuk ke kantong pribadi hingga institusi besar untuk menjalankan kepentingannya. Tak heran bila hal itu menyebabkan juga maraknya pengumpulan zakat berbasis platform yang bagai dua mata koin yang satu sama lain memberikan dampak negatif/ positif.

Satu sisi wadah kebaikan tak akan habis, tetapi di sisi lain, kecenderungan untuk mengawasi atau menelaah lebih jauh aktor-aktor yang menjadi pemanfaat platform harus aktif dilakukan, khususnya kepada BAZNAS sebagai wakil pemerintah. Meskipun demikian, tentu saja masih terdapat strategi atau tindakan-tindakan yang mampu mendorong realisasi zakat untuk secara optimal diraih *stakeholders* terkait agar mampu membantu pemerintah pusat/ daerah menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang ada. Ke depan, pengamatan berupa variabel-variabel pengawasan terhadap efektivitas pengumpulan dana sosial nampaknya harus diulas kembali melalui metode *mix methods* sehingga kompleksitas dinamika dari sisi pemerintah maupun aktor pemanfaat platform tercakupi. Maksud dan tujuan daripada aktor akan lebih mendalam dianalisisnya serta dapat melengkapi indikasi pada tinjauan ini.

⁴⁷ Azy Yazid, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember,” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 173-199.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zainal, "Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens," *Jurnal Translitera* 9 no. 2 (2020): 45-52, <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.989>
- Aisyah Muniaty, "The Role of Zakah and Binary Economics in Poverty Reduction," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4, no. 2 (2014): 178-197, <http://dx.doi.org/10.15408/ess.v4i2.1964>
- Alam Ahmad, "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Jurnal Manajemen UIKA* 9, no. 2 (2018): 128-136, <http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>
- Amelia Erika, "Penyaluran Dana Zakat Produktif melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)," *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (2012): 79-92, <http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v1i2.2600>
- Baihaki Egi, "Islam dalam Merespons Era Digital: Tantangan Menjaga Komunikasi Umat Beragama di Indonesia," *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3 no. 2 (2020): 185-208, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1926>
- Badan Amil Zakat Nasional, "Statistik Zakat Nasional 2019," 2019, <https://pid.baznas.go.id/statistik/>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial," 2017, <http://sdgs.bappenas.go.id/pilar-sosial/>
- Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007-2020," 2021, <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18%2000:00:00/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html>
- Beik Irfan, Hanum Huzaifah, Muljawan Dadang, Yumanita Diana, Fiona Astrid, and Nazar Jhordy. *Core Principles for Effective Zakat Supervision*. Jakarta: BAZNAS - Bank Indonesia, 2015.
- Chamakiotis Petros, Petrakaki Dimitra, and Panteli Niki, "Social Value Creation through Digital Activism in an Online Health Community," *Information Systems Journal* 31, no. 1 (2020): 94-119, <https://doi.org/10.1111/isj.12302>
- Chon Myoung, and Park Hyojung, "Social Media Activism in the Digital Age: Testing an Integrative Model of Activism on Contentious Issues," *Journalism & Mass Communication Quarterly* 97, no. 1 (2020): 72-97, <https://doi.org/10.1177%2F1077699019835896>
- Creswell John, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2009.
- Dulkiah Mohammad, "Pemanfaatan Media dalam Memahami Realitas Sosial di Kalangan Mahasiswa UIN SGD Bandung," *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1 no. 1 (2013): 95-105.
- Hartatno Wenda, "Analisis Pencegahan Tindak Pindana Pendanaan Teroris pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 379-392.
- Juliswara Vibriza, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4 no. 2 (2017): 142-164, <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586>
- Karmanto Gina, and Baskoro, "Penggunaan Platform Crowdfunding dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat," *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2020): 1-15.
- Kinseng Rilus, "Structurgency: A Theory of Action," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (2017): 127-137, <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17972>
- Kettani Driss, and Moulin Bernard. *E-Government for Good Governance in Developing Countries*. London: Anthem Press, 2014.
- Lupton Deborah. *Digital Sociology*. Oxon: Routledge, 2015.
- Masroom Mohd, Yunus Wan, and Huda Miftachul, "Understanding of Significance of Zakat (Islamic Charity) for Psychological Well-being," *Journal of Critical Reviews* 7, no. 2 (2020): 693-697, <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.02.127>

- Musa Armiadi, "Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas *Lex Specialis* dan *Lex Generalis*)," *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2014): 347-370, <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v16i2.1749>
- Muthohar Ahmad, "Preferensi Masyarakat terhadap Lembaga Zakat dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat," *Inferensia: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10 no. 2 (2016): 381-404, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.381-404>
- Nashir Haedar, "Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens," *Sosiologi Reflektif* 7 no. 1 (2012): 1-9.
- Nirzalin, "Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens," *Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala* 3, no. 3 (2013): 15-24.
- Ratnasari Eny, Sumartias Suwandi, and Romli Rosnandar, "Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence in Indonesia," *Nyimak: Journal of Communication* 5, no. 1 (2021): 97-116, <http://dx.doi.org/10.31000/nyimak.v5i1.3218>
- Rohim Ade, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat melalui Digital Fundraising," *Al Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59-90, <https://dx.doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Sari Milya, and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA* 6, no. 1 (2020): 917-929.
- Sarvianto Dwiki, "Dilema Dwifungsi Pemanfaatan Informasi dalam Pembentukan Ketimpangan Sosial Baru di Indonesia (Telaah Sosiologi Digital melalui Perspektif Interaksionisme Simbolik)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 9, no. 2 (2020): 493-509, <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43452>
- Sarvianto Dwiki, "The Role of Digital Platforms in The Transfer of Knowledge and Qualificationism: A Study of Digital Sociology," *Simulacra* 3, no. 1 (2020): 69-80, <https://doi.org/10.21107/sml.v3i1.7125>
- Schwab Klaus. *Revolusi Industri Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Setiadi, "Jawa, Juggernaut, dan Alam sebagai Tembang tentang Ziarah Tanah Jawa," *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra* 1 no. 1 (2013): 75-83, <https://doi.org/10.22146/poetika.v1i1.10386>
- Syafiq Ahmad, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3 no. 1 (2016): 18-39, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>
- The World Bank, "Ikhtisar: Sekilas Tentang Indonesia," 2014, <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>
- Wijaya Reza, and Khotijah Siti, "Memasuki Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Tinjauan Strategi Amil Zakat di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 9 no. 2 (2020): 1-8, <http://dx.doi.org/10.35906/je001.v9i2.569>
- Yazid Azy, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 173-199.